

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani

Pepatah diatas berasal dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang dalam Bahasa Indonesia berarti di depan kita memberi contoh, ditengah membangun prakarsa dan bekerjasama, dibelakang memberi semangat, atau bisa diartikan figur seseorang yang baik adalah disamping menjadi suri tauladan atau panutan, tetapi juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral dari belakang agar orang-orang disekitarnya dapat merasakan situasi yang baik dan bersahabat. Sehingga kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut beliau pendidikan adalah “daya upaya memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak, selaras dengan alamnya dan masyarakatnya”.¹

Melalui pendidikan dapat dikembangkan suatu keadaan yang seimbang antara individu dan sosial. Karena hanya manusialah yang dapat menghayati norma-norma dan nilai-nilai dalam kehidupannya, sehingga manusia dapat menetapkan tingkah laku mana yang baik dan tingkah laku mana yang tidak baik dan tidak bersifat susila. Semua itu dapat terwujud melalui pendidikan.²

Pendidikan adalah tugas bersama manusia dalam merealisasikan misi kemanusiaan yang didukung oleh beberapa komponen pendidikan, yang terdiri dari tujuan, siswa/peserta didik, struktur, guru/pendidik, alat bantu, fasilitas, pengawasan mutu, biaya dan lain-lain. Oleh karena itu pendidikan mesti diatur berdasarkan hubungan intersubjektif³ dan rasional⁴, sehingga

¹ Jurnal-online.um.ac.id/data/artikel.pdf. diakses pada hari sabtu 26 Mei 2018 pukul 20.47 WIB

² Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hlm. 5

³ Dalam bahasa Indonesia Intersubjektif berarti menurut pandangan sendiri. www.kbbi.co.id diakses pada hari Sabtu, 2 Juni 2018 pukul 12.00 WIB

semua komponen benar-benar berjalan sebagaimana fungsinya dalam kerangka yang jelas dan terarah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Komponen-komponen tersebut diatur dengan yang namanya Manajemen pendidikan.⁵

Manajemen pengelolaan pendidikan nasional diatur dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang disahkan oleh presiden pada tanggal 8 juli 2013. UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 tersebut merupakan pengganti UUSPN nomor 2 Tahun 1989 yang sudah tidak relevan lagi dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, karenanya UUSPN 2 Tahun 1989 harus diperbaharui dan diganti. Pembaruan manajemen pengelolaan sistem pendidikan nasional harus disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan.

UUSPN nomor 20 tahun 2003 didasarkan pada prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tuntutan reformasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan.⁶ Kaitannya dengan lembaga pendidikan formal di Indonesia mengacu pada UUSPN nomor 20 tahun 2003 pasal 17 ayat 1-3⁷, pasal 18 ayat 1-4⁸, pasal 19 ayat 1 dan 2⁹.

⁴ Dalam KBBI rasional berarti pertimbangan yang logis. www.kbbi.co.id diakses pada hari Sabtu, 2 Juni 2018 pukul 12.00 WIB

⁵ Muhmidayeli, *Filsafat Pendidikan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.70

⁶ Ara Hidayat, dkk, *Pengelolaan Pendidikan*, Kaukaba, Yogyakarta, 2012, hlm. 45-46

⁷ Ayat 1 berbunyi: Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

Ayat 2 berbunyi: Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Ayat 3 berbunyi: Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

⁸ Ayat 1 berbunyi: Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

Ayat 2 berbunyi: Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

Ayat 3 berbunyi: Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), Madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Proses pergantian UUSPN nomor 2 tahun 1989 ke UUSPN nomor 20 tahun 2003 pada saat itu (awal tahun 2003) menuai pro dan kontra. Sepanjang rancangan UUSPN nomor 20 tahun 2003 hingga pengesahannya Terdapat sepuluh materi yang diperdebatkan yaitu, *pertama* masalah desentralisasi dan kerancauan tanggung jawab perumusan UU Sisdiknas. *Kedua*, ketidak jelasan tanggung jawab pemerintah dan pusat, *ketiga* tanggungan biaya pendidikan antara pemerintah dan masyarakat, *keempat*, pendidikan formal dan non formal, *Kelima*, sentralitas Agama, *keenam* UU Sisdiknas melahirkan watak inlander dan orientasi inward looking, *Ketujuh*, pembebanan sumberdaya pada masyarakat, *kedelapan* adanya dominasi guru, kesembilan asumsi liberalisasi pendidikan, dan *kesepluluh* campur tangan pemerintah yang berlebih-lebihan. Kesepuluh persoalan tersebut, yang menjadi perdebatan hangat dan menuai pro-kontra adalah persoalan agama atau pendidikan agama, tak palak pro dan kontra ini mendapat respon dari berbagai pihak, diantaranya adalah tulisan Ali Masykur menjelaskan bahwa UUSPN nomor 20 Tahun 2003 sudah cukup akomodatif dan representative bila dibandingkan dengan UU No 12 Tahun 1989, sebab selama ini ada pandangan dan reaksi masyarakat yang menyoroti dasar filsafat pendidikan, tujuan pendidikan yang dianggap tidak mencerdaskan, campur tangan pemerintah, aturan yang tidak demokratis dan memihak agama tertentu (Republika 12/5/2003).

Undang-Undang memang bukan sesuatu yang paling sempurna, ternyata masih ada celah yang kurang sesuai. Salah satunya yang disebutkan oleh Sri Hartanto, bahwa UU Sisdiknas ini merupakan upaya demoralisasi dan menjauhkan rakyat dari cita-cita keadilan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Franz Magnis Soseno menilai bahwa agamanisasi yang

Ayat 4 berbunyi: Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

⁹ Ayat 1 berbunyi: Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

Ayat 2 berbunyi: Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka <http://direktori.madrasah.kemenag.go.id/media/files/UU20TH2003.pdf>

begitu kental hanya akan memperburuk hasil pendidikan di sekolah selama agama dipahami secara formalistik, ritualistic, dan eksklusivistik.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, akhirnya UUSPN nomor 20 tahun 2003 disahkan pada tanggal 8 juli 2003. UU ini dinilai bagi penggerak pendidikan Islam sebagai titik awal kebangkitan Pendidikan Islam (madrasah). Dengan demikian Pendidikan Islam (madrasah) semakin diakui dan turut berperan dalam peningkatan kualitas bangsa.¹⁰

Di Indonesia lembaga pendidikan dibagi menjadi tiga jalur, salah satunya yaitu jalur pendidikan formal¹¹, didalam jalur pendidikan formal ada lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), seperti lembaga pendidikan SD, SMP dan SMA dan ada yang berada dibawah naungan Kemenag (Kementerian Agama), yaitu MI, MTS dan MA.¹²

Dalam lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenag (madrasah), manajemen adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan non muslim dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.¹³ Proses manajemen dalam madrasah tidak berbeda dengan organisasi atau lembaga pendidikan lainnya, yaitu dimulai dari proses perencanaan dan diakhiri evaluasi yang mana dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama yang baik antar anggota sehingga kualitas pendidikan

¹⁰ Ara Hidayat, dkk, *Pengelolaan Pendidikan*, hlm. 138-140

¹¹ Tiga jalur lembaga pendidikan tersebut yaitu, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal dan lembaga pendidikan Informal.

Lembaga pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya.

Lembaga pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan nonformal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga Negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal.

Lembaga pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dengan kata lain, lembaga pendidikan informal adalah sebuah lembaga pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. <http://pendis.kemenag.go.id>. Diakses pada hari Sabtu, 2 Juni 2018 pukul 14.00

¹² <http://pendis.kemenag.go.id>. Diakses pada hari Sabtu, 2 Juni 2018 pukul 14.00 WIB

¹³ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, TERAS, Yogyakarta, 2009, hlm.14

akan tercapai secara optimal.¹⁴ Upaya yang terus menerus dilakukan dan berkesinambungan diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan bermutu dan berkualitas, yang dapat menjamin bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sudah sesuai harapan. Apabila layanan sebuah sekolah/madrasah baik, maka dengan sendirinya masyarakat akan menyekolahkan di sekolah tersebut, sehingga regenerasi sekolah/madrasah berjalan dengan baik.¹⁵

Sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan generasi muda umat Islam untuk masa depan, madrasah diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang akan mampu memainkan peran penting di semua sector kehidupan bangsa. Madrasah diunggulkan daripada sekolah umum karena madrasah memberikan pendidikan agama (yang lebih baik daripada sekolah umum) disamping pendidikan umum (yang sama dengan sekolah umum). Selain itu, Madrasah memiliki karakter tersendiri, yaitu madrasah sangat menonjolkan nilai religius masyarakatnya.¹⁶ jadi dapat dikatakan bahwa madrasah merupakan system pendidikan yang mempunyai karakter yang sangat spesifik bukan hanya melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran agama tetapi juga mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan hidup didalam masyarakat.¹⁷

Menurut Syamsul Arifin sangat mendambakan anaknya bersekolah di lembaga pendidikan yang mampu membimbing anak mereka memahami ajaran agamanya, sekaligus menjadi anak yang taat kepada perintah Allah Swt, Rasul, orang tua dan guru berdasarkan nilai-nilai agama. Hal ini dikarenakan Orang tua sering merasa tidak mampu mendidik anak-anak mereka secara langsung karena kesibukan bekerja dan tidak kompeten dalam

¹⁴ Siti Farikhah, *manajemen Lembaga Pendidikan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, cet ke-1, 2011, hlm.269-270

¹⁵ Mulyono, *Pengelolaan Penerimaan Siswa Baru Di SMK IPTEK* Weru Sukoharjo, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol 7, No.1

¹⁶ *Op.cit*, hlm.199-200

¹⁷ Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan berbasis pada Madrasah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2011, hlm.198

hal agama.¹⁸ Untuk hal itu madrasah merupakan pilihan yang dianggap rasional untuk pembentukan karakter anak secara alami.¹⁹

Di Kabupaten Rembang sendiri pada tahun 2017 terdapat 16 Madrasah Aliyah dimana 2 berstatus Negeri dan 14 lainnya berstatus swasta.²⁰ Untuk madrasah aliyah swasta sendiri salah satunya adalah madrasah aliyah NU Lasem yang berada di alamat Jl. Sunan Bonang 87 Lasem. Secara historis, menurut kepala madrasah Ibu Sa'adah, S.Pd.i.,M.Pd, MA NU Lasem merupakan madrasah yang berdiri pada tahun 1983 yang didirikan oleh PC NU Lasem. yang mana awal berdirinya MA NU Lasem ini di latar belakang oleh keresahan para pengasuh pondok pesantren di Lasem diantaranya yaitu KH. Kholil Masyhuri, KH. Ma'soem Ahmad dan KH. Baedlowi atas perkembangan pendidikan formal dalam masyarakat secara khusus dan Rembang pada umumnya.

Atas dasar itulah, para ulama menggagas perlunya suatu lembaga pendidikan yang dalam hal ini dibentuk oleh organisasi NU Cabang Lasem. pada tahun 1980, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Lasem, organisasi otonom bentukan para ulama Lasem melalui NU Cabang Lasem merencanakan 2 jenjang pendidikan sekaligus, yaitu SMP NU dan MA NU. Dengan adanya program itu, dibangunlah beberapa kelas dan perkantoran diatas tanah seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$ milik lembaga pendidikan Ma'arif NU Lasem yang merupakan wakaf dari KH. Abdul Hamid Abdullah (Wafat di Pasuruan, 1982) dan KH. Ali Ma'shu, (Wafat di Yogyakarta, 1989).

Dengan ketuaannya tersebut, lembaga pendidikan MA NU Lasem ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan dalam bidang siswanya, tercatat awal berdiri ada 131 siswa, di tahun berikutnya 84 siswa dan berlangsung sampai 10 tahun setelah berdiri keadaan pendaftar tidak stabil yakni menjadi tidak lebih dari 40 siswa bahkan sampai sekarang pada tahun 2017/2018

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Syamsul Arifin (salah satu warga Desa Kalitengah Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang), dilaksanakan pada hari Kamis 17 Mei 2018

¹⁹ [Jejen.lec.uinjkt.ac.id](http://jejen.lec.uinjkt.ac.id). diakses pada hari Jum'at, 2 Februari 2018 pukul 12.01 WIB

²⁰ <http://referensi.data.kemendikbud.go.id/> diakses pada hari selasa 22 Mei 2018 pukul 15.16 WIB

hanya mempunyai 78 siswa terbagi menjadi kelas X sebanyak 29 siswa, kelas XI sebanyak 23 siswa dan kelas XII sebanyak 24 siswa.²¹

MA NU Lasem dengan sejarah panjang yang dihasilkan oleh para ulama namun tidak didukung dengan jumlah siswa yang signifikan dari tahun ke tahun. Padahal selama berdiri sampai sekarang kepala madrasah MA NU Lasem telah melakukan berbagai usaha seperti, pendekatan dengan masyarakat sekitar, perbaikan pelayanan madrasah dan pengembangan program pembelajaran yang ada di madrasah seperti, MTQ, Tahfid, Komputer, membatik, menjahit dan desain grafis, hingga pembagian banyak beasiswa bagi siswa kurang mampu sampai siswa berprestasi.²² Namun masyarakat masih sangat rendah untuk menyekolahkan anaknya di MA NU Lasem.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“STRATEGI MANAJEMEN MADRASAH DALAM MENINGKATKAN ANIMO PESERTA DIDIK BARU DI MADRASAH ALIYAH NU LASEM”** sebagai bahasannya.

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif menetapkan pendidikan berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi, aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi sinergis.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Tempat (place)

Penelitian ini berada di MA NU Laem yang letaknya berada di Jl. Sunan Bonang 87 Lasem

2. Orang (actor)

Penelitian ini yang menjadi pokok penelitian adalah kepala madrasah, staf madrasah, dan Guru MA NU Lasem

²¹ Wawancara pertama kali dengan kepala sekolah MA NU Lasem, dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Desember 2017

²² Wawancara pertama kali dengan kepala sekolah MA NU Lasem, dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Desember 2017

3. Aktivitas (Activity)

Aktivitas yang dimaksud adalah upaya kepala madrasah dalam rangka meningkatkan animo peserta didik baru

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi manajemen madrasah dalam meningkatkan animo peserta didik baru di MA NU Lasem?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung strategi manajemen madrasah dalam meningkatkan animo peserta didik baru di MA NU Lasem?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui konsep strategi manajemen madrasah yang digunakan dalam meningkatkan animo peserta didik baru di MA NU Lasem
2. Untuk mengetahui apa saja factor penghambat dan pendukung strategi manajemenmadrasah dalam meningkatkan animo peserta didik baru di MA NU Lasem

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini semoga dapat memperkaya khazanah keilmuan (bahan, kajian kepustakaan) sebagai sumbangsih dan dedikasi penulis dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pertimbangan (rujukan) bagi peneliti di kemudian hari yang ingin mendalami tentang strategi manajemen medrasah dalam meningkatkan animo peserta didik baru

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi MA NU Lasem agar selalu memperbaiki kualitas layanan pendidikannya demi kemajuan madrasah.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika ini dimaksudkan sebagai gambaran umum yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi kedalam tiga bagian secara garis besar, yaitu:

1. Bagian Muka

Pada bagian ini memuat halaman judul, nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstraksi, halaman daftar isi, dan halaman tabel.

2. Bagian Isi

Bab I Pendahuluan: yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka: Bab ini membahas beberapa bagian sub, yang pertama tentang deskripsi teori, adapun didalamnya memuat beberapa bagian yaitu tentang strategi manajemen madrasah dan peningkatan animo peserta didik baru. Kedua, tentang penelitian terdahulu. Ketiga, tentang kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian: bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta analisis data.

Bab IV Data dan Analisis: Bab ini akan dipaparkan laporan data seperti gambaran umum dan profil madrasah, analisis tentang strategi manajemen madrasah dalam meningkatkan animo peserta didik baru di MA NU Lasem

Bab V Penutup: Bab ini memuat kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Penutup

Bagian terakhir ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

